



SKRIPSI

KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL NANGGROE ACEH

DARUSSALAM DITINJAU DARI UNDANG UNDANG

NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

LOCAL POLITICAL NANGGROE ACEH DARUSSALAM PARTY

POSITION ACORDING TO TERMS OF LAW NUMBER 2

2011 ABOUT POLITICAL PARTY

MUHAMMAD AZHARI RAHMAN

NIM : 070710101043

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

*LOCAL POLITICAL NANGGROE ACEH DARUSSALAM PARTY
POSITION ACORDING TO TERMS OF LAW NUMBER 2
2011 ABOUT POLITICAL PARTY*

MUHAMMAD AZHARI RAHMAN
NIM : 070710101043

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

**PROPOSAL TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 MARET 2012**

**Oleh :
Pembimbing**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 1971005011993031001

Pembantu pembimbing

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H
NIP : 197004101998021001

**MENGESAHKAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

**An. DEKAN
PEMBANTU DEKAN I**

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

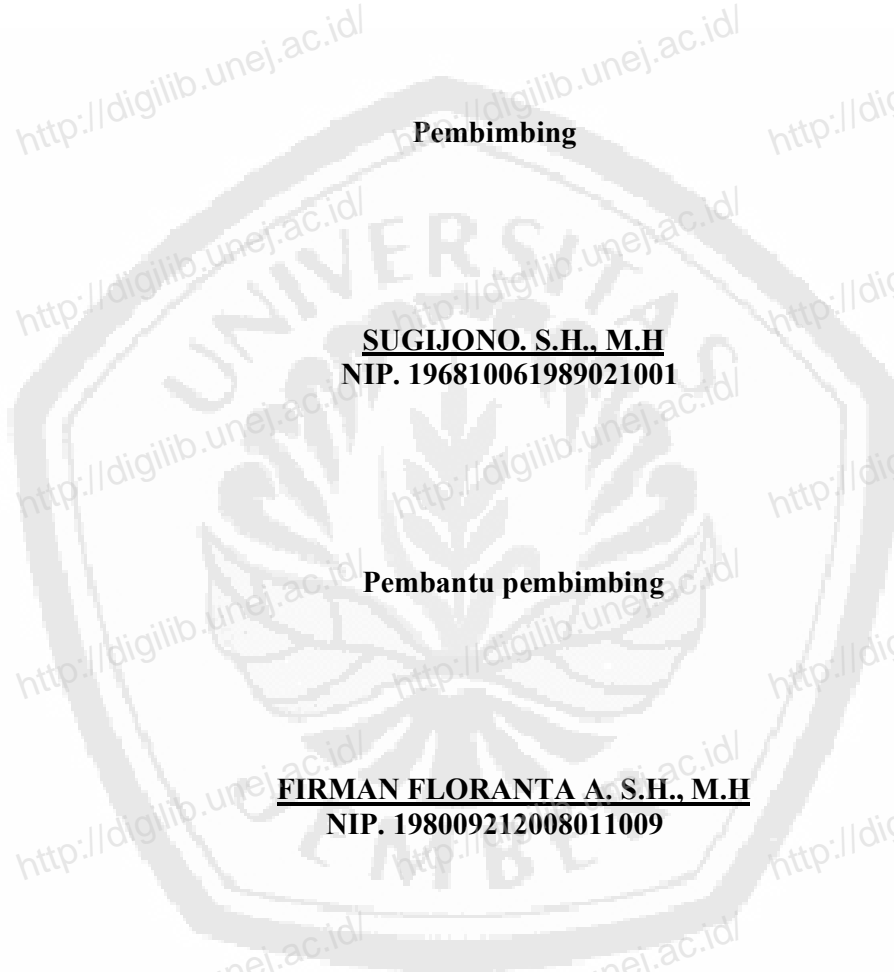
**PROPOSAL INI TELAH DISEMINARKAN
PADA TANGGAL 28 NOVEMBER 2011**

Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H
NIP. 196810061989021001

Pembantu pembimbing

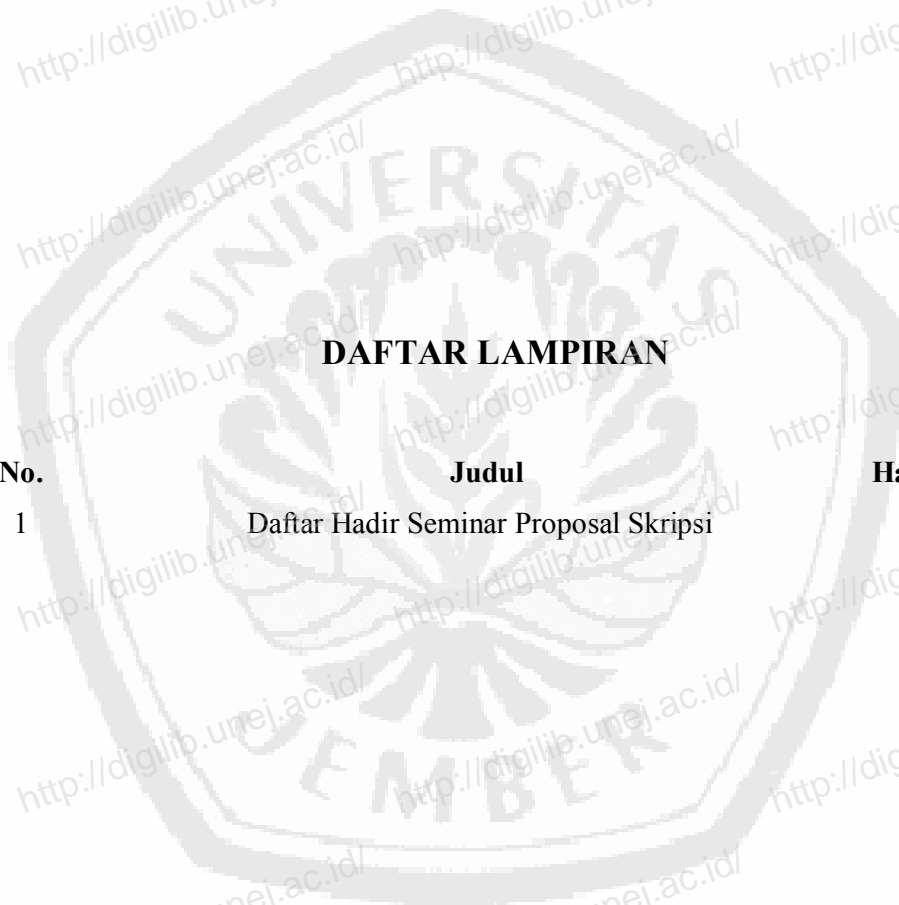
FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H
NIP. 198009212008011009



DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perjanjian	7
2.1.1 Pengertian Perjanjian	7
2.1.2 Azas Azas Perjanjian.....	8
2.1.3 Subjek Perjanjian	11
2.2 Lahirnya Perjanjian	14
2.2.1 Syarat Sahnya Perjanjian.....	14
2.2.2 Bentuk Perjanjian	16
2.2.3 Perjanjian Baku	20
2.2.4 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	13
2.2.5 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Tradisional	18
2.3 Pelaksanaan Perjanjian	27
2.3.1 Pengertian Prestasi	27
2.3.2 Pengertian Wanprestasi	28
2.3.3 Bentuk Bentuk Wanprestasi	29
2.4 Jaminan	32
2.4.1 Pengertian Jaminan	32
2.4.2 Macam Macam Jaminan	33
2.5 Perjanjian Sewa Beli	35
2.5.1 Pengertian Perjanjian Sewa Beli	35
2.5.2 Sewa Beli dan Common Law dan Civil Law	37

2.5.3	Latar Belakang Munculnya Perjanjian Sewa Beli	38
2.5.4	Dasar Hukum Perjanjian Sewa Beli	39
2.5.5	Bentuk dan Substansi Perjanjian Sewa Beli	40
2.5.6	Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Beli	41
2.5.7	Hak dan Kewajiban antara Penjual Sewa dan Pembeli Sewa	42
2.5.8	Berakhirnya Perjanjian Sewa Beli	43
2.6	Perjanjian Pinjam Meminjam	43
2.6.1	Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	43
2.6.2	Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	44
2.7	Lembaga Pembiayaan Konsumen	44
2.7.1	Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen	44
2.7.2	Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen	46
BAB III	METODE PENELITIAN	48
3.1	Tipe Penelitian	48
3.2	Pendekatan Masalah	48
3.3	Bahan Hukum	49
3.4	Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV	SISTEMATIKA PENULISAN	52
DAFTAR BACAAN		



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1	Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi	



SKRIPSI

KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

LOCAL POLITICAL NANGGROE ACEH DARUSSALAM PARTY
POSITION ACCORDING TO TERMS OF LAW NUMBER 2
OF 2011 REGARDING POLITICAL PARTY

MUHAMMAD AZHARI RAHMAN
NIM : 070710101043

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

**LOCAL POLITICAL NANGGROE ACEH DARUSSALAM PARTY
POSITION ACCORDING TO TERMS OF LAW NUMBER 2
OF 2011 REGARDING POLITICAL PARTY**

MUHAMMAD AZHARI RAHMAN
NIM : 070710101043

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”*

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)

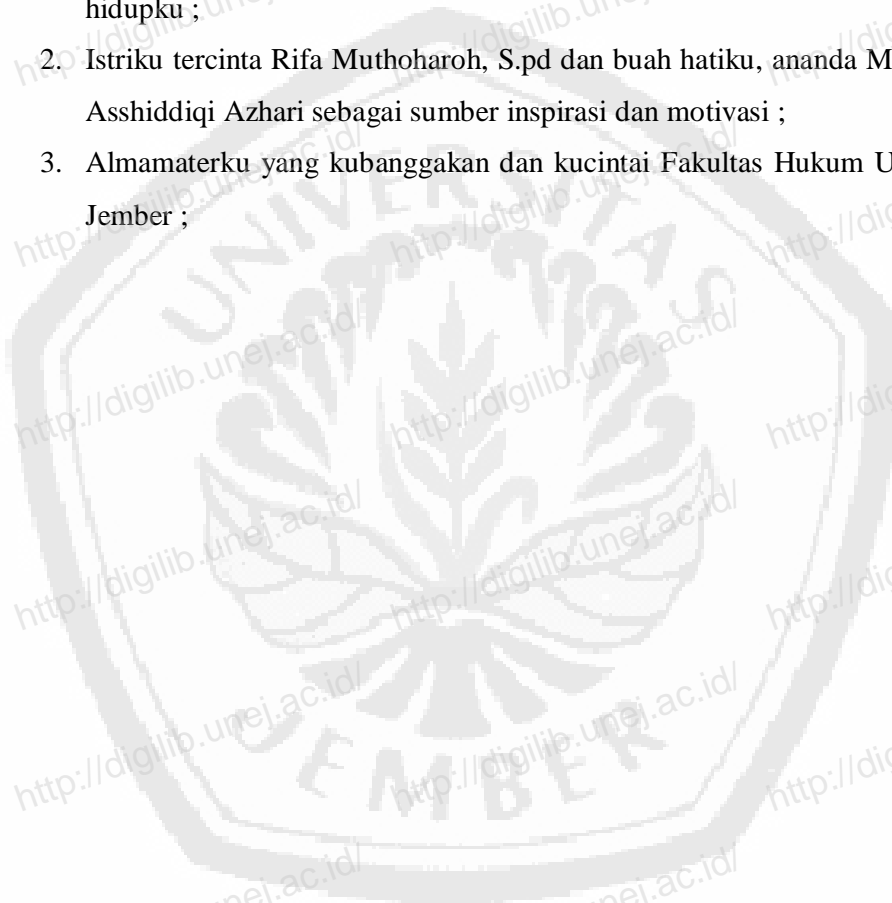


* Douwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, Dari Timur ke Barat Memandu Hukum, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 119

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Fathorahman, S.H. dan Ibunda Dra.Inayah yang telah tulus ikhlas telah mencurahkan kasih sayang, doa serta pengorbanan tanpa keluh kesah dan memberikan arti dalam perjalanan hidupku ;
2. Istriku tercinta Rifa Muthoharoh, S.pd dan buah hatiku, ananda Muhammad Asshiddiqi Azhari sebagai sumber inspirasi dan motivasi ;
3. Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Fakultas Hukum Universitas Jember ;



**KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

MUHAMMAD AZHARI RAHMAN
NIM : 070710101043

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

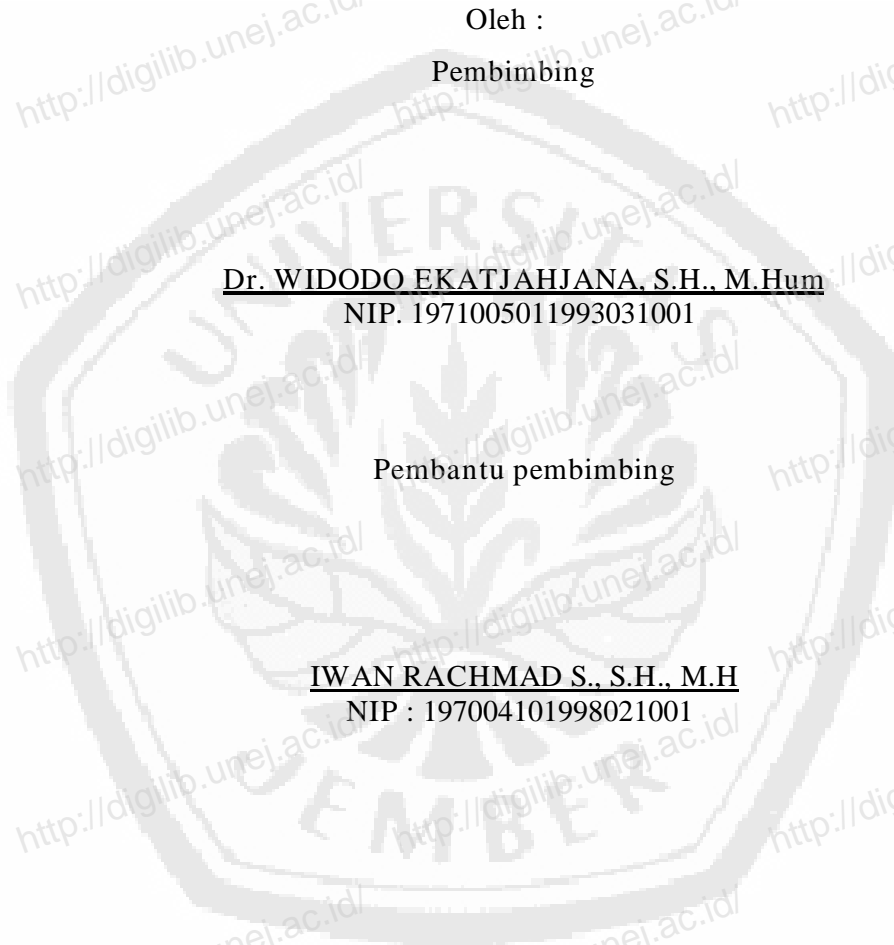
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 JUNI 2012**

Oleh :
Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 1971005011993031001

Pembantu pembimbing

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H
NIP : 197004101998021001



PENGESAHAN

KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Oleh :

MUHAMMAD AZHARI RAHMAN

NIM : 070710101043

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H IWAN RACHMAD S., S.H., M.H

NIP. 196312011989021001

NIP. 196812302003122001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH,S.H.M.Hum

NIP.196001011988021001

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 6

Bulan : Juli

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

RIZAL NUGROHO, S.H., M.H.
NIP. 195611251984031002

A'AN EFFENDI, S.H., M.H.
NIP : 198302032008121004

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 196312011989021001

2. **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 196812302003122001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Azhari Rahman

NIM : 070710101043

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL NANGGROE ACEH DARUSSALAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Juni 2012

Yang menyatakan,

MUHAMMAD AZHARI RAHMAN

NIM : 070710101043

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Kedudukan Partai Politik Lokal Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak A'an Effendi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof Dr. M. Arief Amrullah S.H M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto S.H M.H, Mardi Handono S.H M.H, Eddy Mulyono S.H M.H selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Keluarga yang selalu penulis cintai dan banggakan. Rasa syukur yang tidak bisa penulis haturkan dengan kata-kata atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas

yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima Kasih telah menjadikan penulis seorang Sarjana Hukum ;

9. Sahabat-sahabat penulis, Riki Yustika, Arif Rahman, Endra (Kingkong), Cakra, Darul, Gepeng, Lidya, Topek, Riska, Prandy, Nindya, Roji, Abi, Yongki, Tyo, Farid, dan lainnya yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu, semoga persaudaraan kita kekal abadi ;
10. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini ;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini ;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Juni 2012
Penulis,

MUHAMMAD AZHARI RAHMAN
NIM : 070710101043

RINGKASAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, telah memberikan jaminan yang tegas dalam hal kemerdekaan untuk berserikat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Banyaknya partai politik yang telah berdiri, di sisi lain ternyata masih menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian masyarakat di daerah-daerah. Sebagian masyarakat di daerah masih menganggap aspirasi mereka belum bisa diperjuangkan oleh partai politik yang ada tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat dipahami apabila kemudian timbul anggapan di masyarakat bahwa partai politik yang ada masih terlalu menyibukkan diri dengan isu-isu yang sifatnya “perebutan kursi kekuasaan di pusat” saja. Akibatnya, timbul kekecewaan pada diri masyarakat daerah terhadap partai politik. Kekecewaan masyarakat daerah itu pada perkembangan selanjutnya dapat mendorong timbulnya upaya untuk mendirikan partai politik lokal.

Sekalipun secara historis kehadiran partai politik lokal punya dasar yang cukup kuat, apakah dari aspek hukum (tata negara) kehadiran partai politik lokal dapat dibenarkan. Pertanyaan ini menjadi penting karena ada pendapat yang mengatakan bahwa Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak memungkinkan adanya partai politik lokal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengkaji dan menganalisa lebih mendalam lagi tentang kedudukan partai politik lokal khususnya di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dengan judul : “Kedudukan Partai Politik Lokal Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011”

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu (1) Apakah partai politik lokal Nanggroe Aceh Darussalam bertentangan dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik ? dan (2) Apakah partai politik lokal Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengikuti pemilu dan pemilukada dalam tingkat lokal maupun nasional. Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan

dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara terkait Kedudukan Partai Politik Lokal Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum sebagai penunjang.

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa Dalam konteks yuridis, pembentukan partai politik lokal di Indonesia masih terhalang oleh aturan-aturan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), dapat dipahami sebagai suatu bentuk jaminan konstitusional terhadap setiap warga negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul, yang salah satunya adalah dengan membentuk partai politik. Di satu sisi, dengan membaca ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (3), maka tidak cukup kuat alasan untuk mengatakan bahwa UUD 1945 menutup kemungkinan bagi kehadiran partai politik lokal. Eksistensi parpol lokal di Aceh secara yuridis tidak lagi bertentangan ketika Undang Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh telah mengamanatkannya.

Kehadirannya juga merupakan bagian dari road map to peace process di Aceh. Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengikuti Pemilihan Umum Nasional, khusus di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Demikian halnya dengan Pemilukada, menjadi salah satu agenda resmi yang diikuti oleh Partai Politik Lokal di Aceh. Melalui Pilkada itulah aspirasi masyarakat Aceh yang selama ini kurang mendapat tanggapan akan tersalurkan. Pilkada di Aceh dilaksanakan oleh Komisi Independent Pilkada (KIP) Keberadaan partai politik lokal dapat dikatakan memiliki kaitan yang erat dengan masalah HAM. Di satu sisi keberadaan suatu partai politik lokal dapat dilihat sebagai salah satu bentuk perwujudan HAM, terutama hak kemerdekaan berserikat (freedom of association), dan di sisi yang lain, keberadaan partai politik lokal akan dapat berfungsi sebagai pembawa aspirasi masyarakat daerah dalam memperjuangkan kepentingan mereka dalam proses pembangunan

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Partai Politik	10
2.1.1 Pengertian Partai Politik	10
2.1.2 Fungsi Partai Politik	14
2.1.3 Dasar Hukum Pembentukan Partai Politik	16

2.2	Partai Politik Lokal	20
2.2.1	Latar Belakang dan Tujuan Terbentuknya Partai Politik Lokal	20
2.2.2	Partai Politik Lokal dan Otonomi Daerah	22
2.2.3	Dasar Hukum Pembentukan Partai Politik Lokal	26
2.3	Pemilihan Umum	28
2.3.1	Konsep Pemilihan Umum	28
2.3.2	Sistem Pemilihan Umum	32
2.3.3	Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia	38
BAB III	PEMBAHASAN.....	42
3.1	Keberadaan Partai Politik Lokal Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik	42
3.2	Keikutsertaan Partai Politik Lokal Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Pemilu Dan Pemilukada Dalam Tingkat Lokal Maupun Nasional	55
BAB IV	PENUTUP	67
4.1	Kesimpulan	67
4.2	Saran-saran	68
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

